Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Ajukan APBD Kok Rp 66.9 Triliun

DPRD Minta Naik Rp72 Triliun

JAKARTA-Komisi C DPRD DKI menolak usulan Pemerintah Provinsi Jakarta terkait pagu indikatif Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD DKI 2021 sebesar Rp 66,9 triliun. Dewan mendesak agar APBD dinaikkan menjadi Rp 72 triliun.

Penolakan tersebut kemudian berujung dengan rapat Komisi C dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diskor hingga satu minggu untuk DKI memenuhi permintaan Komisi C. Ketua Komisi C Habib Muhamad Salim. Alatas akhirnya menunda hingga pekan depan.

Habid meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk kembali menggali potensi-potensi pendapatan daerah di sektor-sektor penerimaan lainnya. Antara lain di bidang aset DKI. Selain itu, saat ini sejumlah peraturan daerah yang akan mendukung penambahan pendapatan daerah hampir selesai pembahasan.

Salah satunya terkait peraturan daerah tentang retribusi pajak. Menurut dia, hal tersebut akan menambah pendapatan DKI pada tahun 2021. Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi C lainnya Dimaz X, yang meminta agar Pemprov DKI menaikkan pagu indikatif APBD 2021 menjadi Rp72 triliun.

Menurut dia, angka tersebut memungkinkan karena tahun 2021 kondisi perekonomian akan lebih bergerak dari tahun ini. "Untuk tahun 2021 kan kita sudah menuju kehidupan baru, new normal. Ini saatnya APBD kita bangkit," ujarnya, di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Dimaz mengatakan sejumlah anggaran sangat dibutuhkan pada tahun depan terutama dalam menstimulus perekonomian 2021 agar lebih bergerak. Dengan demikian, kata dia, persoalan ekonomi saat pandemi Covid-19 seperti PHK, UMKN bisa diatasi.

Ia meminta agar Pemerintah Provinsi DKI kembali memeriksa TAPD yang memiliki potensi pendapatan daerah karena saat ini pendapatan daerah masih tertumpu pada pajak. "Kasihan warga kalau kita titik beratkan pada pajak. Jadi harus didorong pendapatan di sektor-sektor lain," ujarnya.

Menanggapi itu, Wakil Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Tri Indrawan mengatakan akan berupaya mengoreksi kembali penyusunan pagu indikatif APBD DKI 2021. Termasuk, melihat potensi perekonomian yang mungkin masih akan terus terjadi di sepanjang masa PSBB Transisi hingga new normal mendatang.

"Jadi kami akan terus koreksi soal penghitungan ini. Saya akan sampaikan ke kepala Bappeda karena memang pembahasan masih akan terus berkembang. Seminggu ini bisa saja ada asumsi perubahan angka-angka masih mungkin terjadi, karena sektor ekonomi juga sudah mulai bangkit," ujarnya.

Ganti dengan Uang

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengungkapkan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait pergantian bantuan sosial (bansos) di Jakarta. Dia berharap bantuan diganti uang.

"Kita sudah dengar tapi arahan bansos dalam bentuk apa belum tahu. Kita harapkan itu dalam bentuk BTL (Bantuan Tunai Langsung) saja," ujar Iman di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020.

Ia menyebut pergantian program sudah dibahas dalam rapat antara Komisi E dan Dinas Sosial DKI Jakarta bulan lalu. Kemungkinan besar sembako diganti tunai. Rapat juga membahas data penerima bansos yang masih perlu diperbaiki. Iman mengungkapkan daftar penerima masih belum sinkron hingga pembagian bansos tahap ke empat.

"Ada yang dobel, ada yang seharusnya tak dapat," kata dia. Kementerian Sosial bakal menangani langsung penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa sembako periode Juli-Desember 2020 di Jakarta. Sementara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan melanjutkan pemberian bansos.

"Kami sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI beberapa hari lalu. Kami mendapat konfirmasi bahwa Juli-Desember Pemprov DKI fokus ke program lain. Tidak akan melanjutkan program bansos sembako," ungkap Menteri Sosial Juliari Batubara. Nilai bantuan dikurangi dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per keluarga per bulan. Pemberian sembako mencakup enam tahap penyaluran. **(dni)**